

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya kebijakan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah daerah untuk bisa mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Transparan artinya pemerintah memberikan informasi serta layanan secara terbuka kepada masyarakat tanpa harus ada yang di tutup-tutupi. Sedangkan akuntabilitas adalah pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan kepastian kepada publik apakah pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu pemerintah wajib memenuhi kedua tuntutan tersebut dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada publik berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami dan sesuai dengan yang telah di isyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Di sektor pemerintahan, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan di periksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas dalam pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan Negara yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga Negara. Dan kemudian hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut akan di sampaikan kepada DPR/DPRD dan DPD serta disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati.

Bentuk pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan di lakukannya pemeriksaan ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan telah dibuat secara wajar. Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) ini adalah berupa opini auditor yang terdiri dari 5 jenis opini auditor atas hasil audit laporan keuangan menurut standar professional akuntan publik (SPAP) yaitu:

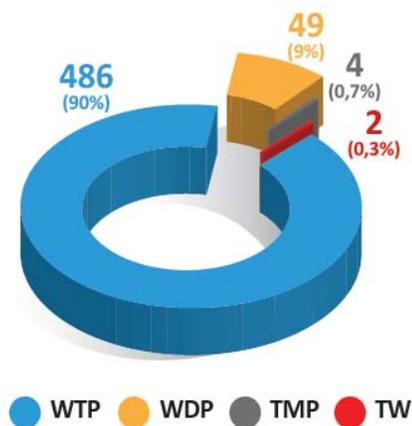
1. Opini wajar tanpa Pengecualian (WTP)
2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
3. Opini wajar dengan pengecualian
4. Opini tidak wajar
5. Opini tidak menyatakan pendapat

Penilaian tertinggi terhadap kualitas laporan keuangan adalah Opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini ini penting untuk didapatkan karena menjamin kualitas laporan keuangan telah wajar disajikan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dan bagi laporan keuangan yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian itu bisa dikategorikan sebagai laporan keuangan yang belum atau kurang berkualitas sehingga dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan menimbulkan tuntutan hukum serta mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Fidhotuzahra (2020) berpendapat bahwa Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi yang jujur, benar, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan. Dengan dibuatnya laporan keuangan yang berkualitas tersebut akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah atas permasalahan kasus atau skandal keuangan yang terjadi. Berdasarkan informasi dari laporan keuangan yang berkualitas tersebut pemerintah dapat memprediksi biaya yang

rasional untuk pelayanan masyarakat dan subsidi yang akan di berikan kepada masyarakat.

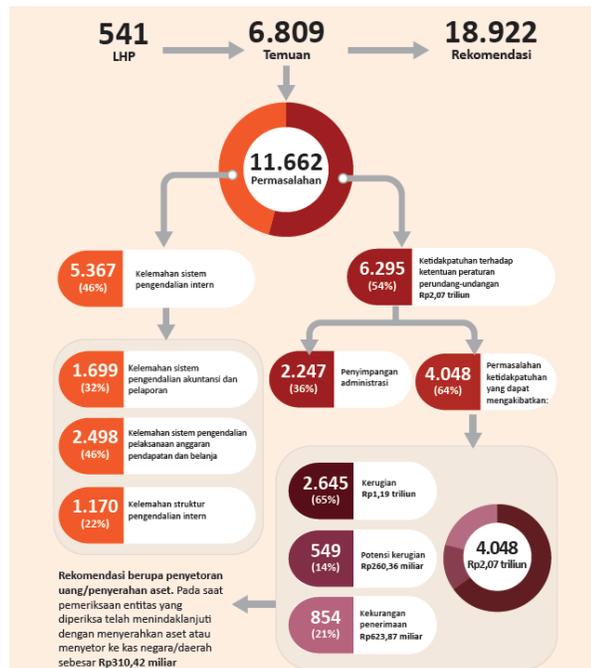
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh informasi dari 541 hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020, diungkapkan 486 (90%) LKPD memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 49 (9%) LKPD memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP), 4 (0,7%) memperoleh predikat opini tidak menyatakan pendapat (TMP), dan 2 (0,3%) memperoleh predikat opini tidak wajar (TW).



**Diagram 1.1**

### **Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2020**

Pemerintah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan karena masih banyaknya kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal dan Permasalahan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan (BPK, 2020)



**Gambar 1.1**  
**Temuan Pemeriksaan BPK**

Selain itu, dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap 6.809 temuan yang memuat 11.662 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan tersebut terdiri dari 5.367 terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan 6.295 terkait ketidapatuhan terhadap undang-undang (BPK, 2020).

Maka dari itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan yang namanya Standar akuntansi pemerintah (SAP), Standar akuntansi pemerintah ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP merupakan pedoman atau petunjuk dalam kegiatan penyusunan dan menyajikan laporan keuangan, Mulai dari proses pencatatan, pembukuan sampai dengan proses pelaporan. Adapun tujuan berpedoman pada SAP (PP No.71 Tahun 2010) ini adalah untuk mempermudah ASN bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan

yang berkualitas. Penerapan dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah ini di percaya dapat menjadi cara penyelesaian untuk setiap permasalahan keuangan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas agar meraih predikat opini WTP dari BPK menurut suryaningsum & Sriyono (2020) adalah kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman standar akuntansi pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya terkait pemahaman SAP telah dilakukan oleh Pujanira (2017), Sanjaya (2017), suryaningsum & Sriyono (2020), Ansar & Syahdan (2022) menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik pemahaman SAP maka Semakin baik juga kualitas laporan keuangan.

Selain itu, dalam proses pengelolaan keuangan juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam menguasai teknologi. Maka dari itu organisasi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian internal (SPI). Nasrullah (2021) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal adalah langkah yang dilakukan manajemen dalam memberikan jaminan dan kepastian yang wajar atas pencapaian operasi yang efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang andal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Nasrullah dkk, 2021).

Sistem pengendalian dibentuk dari lima komponen yang terdiri dari: (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Aktivitas pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; (5) Pemantauan dan pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan parameter yang harus di implementasikan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain Sistem Pengendalian Internal (SPI), dalam pengelolaan laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait kompetensi sumber daya manusia, hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian organisasi yang

bersangkutan. Selain itu juga kompetensi SDM juga berperan penting agar pelaporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Tingkat kompetensi yang tinggi akan memudahkan aparatur dalam memahami dan menguasai SAP yang baik sehingga dapat mendukungnya untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas (Darwanis, 2016). Teori ini diperkuat oleh penelitian Wati (2014) dan Rafid (2016) yang menyimpulkan bahwa kompetensi yang tinggi dan pemahaman SAP yang baik dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan dari penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya, masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) dari beberapa peneliti terdahulu. Penelitian tentang pemahaman SAP telah dilakukan oleh Sari (2014), Wati (2014), Darwanis (2016), Armel (2017), Pujanira (2017), Sanjaya (2017) yang menyimpulkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baiknya pemahaman SAP maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artana (2016), Inapty dan Martiningsih (2016) dan Puspitawati (2016) memberikan hasil yang berbeda yaitu pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan masih minimnya aparatur yang memiliki kompetensi sehingga pemahaman SAP masih belum optimal dan dikuasai oleh aparatur.

Hasil penelitian dari Surastiani & Handayani (2015), Karsana & Suaryana (2017), Widari & Sutrisno (2017), (Trisnawati & Wiratmaja, 2018), (Dewi *et al.*, 2019), (Widaryani & Kiswanto, 2020), (Indrayani & Widiastuti, 2020), (Ulisanti & Asrori, 2021) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian dari Katharina *et al* (2019) menemukan hasil yang berbeda yaitu sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat dan melakukan penelitian yang berjudul

**‘‘Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang)’’.**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang Karena terdapat fenomena dimana mayoritas permasalahan yang kerap muncul pada laporan keuangan pada unit SKPD Kabupaten Ketapang adalah permasalahan sistem pengendalian intern terkait aset yang masih konstan ditemukan pada setiap tahunnya meskipun mendapatkan opini WTP. Opini WTP diartikan sebagai laporan yang dibuat sesuai dengan standar yang diterapkan dan tidak ada kesalahan material dan disajikan secara wajar. Namun, faktanya masih saja ditemukan permasalahan setiap tahunnya meskipun memperoleh opini audit WTP ([www.bpkadketapang.id](http://www.bpkadketapang.id))

Penelitian ini mengembangkan penelitian (Sihasale, Sulityo & Setiyowati, 2018) tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi di SKPD BPKAD Kabupaten Malang.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah adanya perubahan variabel independennya yang sebelumnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi menjadi penerapan sistem pengendalian internal. Karena menurut penulis, dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah dan mengurangi tingkat kecurangan akuntansi sehingga laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Perbedaan selanjutnya terdapat pada alat analisis yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi SPSS sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi WarpPLS.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka secara spesifik dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi sebagai berikut:

1. Secara empiris, untuk menguji terkait pemahaman standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi.

2. Untuk memberikan solusi terkait permasalahan pemahaman yang berhubungan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah terkait.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi peneliti lainnya yang akan meneliti hal yang sama.
5. Kontribusi untuk jurusan, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa sebagai syarat menempuh sarjana S1 Akuntansi.